

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Daerah Pelosok (Studi Pada SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma)

Evaluation Of The Implementation Of The Independent Learning Curriculum Policy In Remote Areas (Study At Junior High School 13 Seluma Regency)

Delon Hadi Winata ¹⁾; Yanuar Rikardo ²⁾; Yusuarsono ³⁾; Evi Lorita ⁴⁾
^{1,2,3,4)} *Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu*
 Email: ¹⁾ delonhadiwinata20@gmail.com

How to Cite :

Winata, D, W., Rikardo, Y., Yusuarsono., Lorita, E. (2026). Evaluation Of The Implementation Of The Independent Learning Curriculum Policy In Remote Areas (Study At Junior High School 13 Seluma Regency). Social Sciences Journal. 2(4).

ARTICLE HISTORY

Received [05 Mei 2026]

Revised [15 Agustus 2026]

Accepted [19 Agustus 2026]

KEYWORDS

Policy Evaluation, Independent Learning Curriculum, Effectiveness, Remote Schools.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Daerah Pelosok (Studi Pada Smp Negeri 13 Kabupaten Seluma) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dukomintasi. Setelah di peroleh hasil penelitian di analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, 3 informan kunci dan 4 informan pokok. 1) Efektivitas: Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma telah berjalan cukup efektif. Perencanaan pembelajaran telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran, ATP, dan modul ajar. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan kesiapan belajar di daerah pelosok. 2) Efesiensi: Dari sisi efisiensi, pengelolaan waktu dan pemanfaatan sumber belajar telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui pengaturan jadwal, struktur kurikulum, dan supervisi pembelajaran. Guru telah memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Namun efisiensi belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana dan media digital serta kebutuhan waktu tambahan pada pembelajaran berbasis proyek. 3) Kecukupan: Materi, kegiatan pembelajaran, dan sistem evaluasi yang diterapkan dinilai cukup memadai dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran Kurikulum Merdeka. Materi telah disusun berdasarkan pemetaan capaian pembelajaran dan disesuaikan dengan kondisi siswa. 4) Pemerataan: Prinsip pemerataan dalam pembelajaran sudah diupayakan melalui penerapan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan mulai diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 5) Responsivitas: Pelaksanaan Kurikulum Merdeka menunjukkan tingkat responsivitas yang baik. Sekolah dan guru melakukan penyesuaian pembelajaran berdasarkan hasil asesmen, supervisi, dan refleksi. Tindak lanjut dilakukan melalui remedial, pengayaan, revisi modul ajar, dan perbaikan strategi mengajar. Koordinasi antara kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru mendukung proses perbaikan berkelanjutan. 6) Ketepatan: Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Dari aspek kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik, pelaksanaan pembelajaran sudah mengarah pada prinsip diferensiasi dan fleksibilitas.

ABSTRACT

This study aims to find out the Evaluation of the Implementation of the Independent Learning Curriculum Policy in Remote Areas (Study at State Junior High School 13 Seluma Regency) The method used in this study is descriptive qualitative research. Furthermore, data collection techniques are carried out by means of interviews, observations, and collaborations. After obtaining the results of the research, it is analyzed by means of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The informants in this study are 7 people, 3 key informants and 4 main informants. 1)

Effectiveness: The implementation of the Independent Curriculum at SMP Negeri 13 Seluma has been quite effective. The learning plan has been prepared based on learning outcomes, ATP, and teaching modules. However, there are still obstacles to the difference in students' abilities and limited learning readiness in remote areas. 2) Efficiency: In terms of efficiency, time management and the use of learning resources have been implemented quite well through scheduling arrangements, curriculum structure, and learning supervision. Teachers have taken advantage of various learning media. However, efficiency is not optimal due to the limitations of infrastructure and digital media facilities and the need for additional time for project-based learning. 3) Adequateness: The materials, learning activities, and evaluation system implemented are considered adequate in supporting the achievement of the learning objectives of the Independent Curriculum. The material has been prepared based on learning outcome mapping and adjusted to the condition of students. 4) Equity: The principle of equity in learning has been pursued through the application of student-centered learning and the implementation of differentiated learning. Teachers provide students with equal opportunities to participate in learning. 5) Responsiveness: The implementation of the Independent Curriculum shows a good level of responsiveness. Schools and teachers make learning adjustments based on the results of assessment, supervision, and reflection. Follow-up is carried out through remedial, enrichment, revision of teaching modules, and improvement of teaching strategies. Coordination between school principals, curriculum leaders, and teachers supports the process of continuous improvement. 6) Accuracy: Implementation of the Independent Curriculum From the aspect of conformity with the needs of students, the implementation of learning has led to the principles of differentiation and flexibility.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan bangsa yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai karakter, etika, serta kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sistem pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembaruan kebijakan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah penerapan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari program Merdeka Belajar.

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai respons terhadap kebutuhan transformasi pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Melalui Kurikulum Merdeka, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan penguatan kompetensi dasar, pengembangan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, serta pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.

Penerapan Kurikulum Merdeka memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai peraturan turunan yang mengatur standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses pembelajaran. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan yang selama ini dihadapi, termasuk kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, rendahnya literasi dan numerasi peserta didik, serta kebutuhan akan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan manajemen sekolah, serta kondisi sosial dan geografis masing-masing satuan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok, yang umumnya masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan, akses teknologi informasi, serta kesempatan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik. Oleh karena itu, evaluasi

terhadap pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka. Sekolah ini berada di wilayah yang memiliki karakteristik daerah pelosok dengan berbagai keterbatasan yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan. Berdasarkan kondisi lapangan, implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma baru mulai diterapkan pada tahun 2024 dan belum mencakup seluruh jenjang kelas. Pada tahun ajaran 2024/2025, penerapan kurikulum tersebut masih terbatas pada kelas VII dan VIII. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan informasi, serta minimnya sosialisasi mengenai kebijakan kurikulum yang baru.

Dalam pelaksanaannya, sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, antara lain menyusun Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar, serta mengintegrasikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) ke dalam proses pembelajaran. Selain itu, sekolah juga mulai menerapkan asesmen yang lebih beragam dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti akses internet, perangkat teknologi, serta ketersediaan sumber belajar yang memadai.

Data sekolah menunjukkan bahwa SMP Negeri 13 Seluma memiliki 212 peserta didik dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 38 orang yang terdiri atas guru berstatus PNS, PPPK, dan honorer. Walaupun jumlah tenaga pendidik relatif memadai, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya terkait kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan melaksanakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Selain itu, keterbatasan pelatihan dan pendampingan menyebabkan tingkat pemahaman guru terhadap konsep dan praktik Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya merata.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan dibandingkan tahun sebelumnya. Guru mulai memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep Kurikulum Merdeka dan lebih mampu menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik juga mulai terbiasa dengan pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada siswa. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran mengalami peningkatan meskipun belum sepenuhnya optimal. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi yang positif, namun tetap memerlukan evaluasi yang komprehensif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam perspektif administrasi publik, evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan suatu kebijakan. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di daerah pelosok.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Daerah Pelosok (Studi pada SMP Negeri 13 Kabupaten Seluma) menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah pelosok.

LANDASAN TEORI

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan adalah proses penilaian terhadap hasil dan dampak kebijakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah publik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi tidak hanya berfungsi mengukur keberhasilan, tetapi juga memberikan informasi bagi pengambilan keputusan terkait perbaikan, pengembangan, atau penghentian suatu kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, evaluasi digunakan untuk menilai pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 13 Seluma. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn karena dinilai mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dunn mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menilai suatu program atau kebijakan, yaitu:

Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas diukur melalui ketercapaian tujuan pembelajaran, peningkatan kompetensi peserta didik, penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka.

Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Evaluasi efisiensi mencakup pemanfaatan waktu pembelajaran, penggunaan sarana dan media pembelajaran, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah disusun.

Kecukupan (Adequacy)

Kecukupan menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, aspek ini berkaitan dengan kecukupan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sistem evaluasi dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Pemerataan (Equity)

Pemerataan mengacu pada distribusi manfaat kebijakan yang adil kepada seluruh kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, pemerataan dilihat dari kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, memperoleh layanan pendidikan, dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar tanpa diskriminasi.

Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas merupakan kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan, harapan, dan aspirasi para pemangku kepentingan. Aspek ini menilai bagaimana guru, siswa, dan pihak sekolah menanggapi pelaksanaan Kurikulum Merdeka serta kemampuan sekolah dalam melakukan perbaikan terhadap berbagai kendala yang muncul.

Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik sasaran. Dalam penelitian ini, ketepatan dilihat dari kesesuaian pelaksanaan Kurikulum Merdeka dengan kondisi peserta didik, sumber daya sekolah, serta lingkungan pendidikan di SMP Negeri 13 Seluma.

Keenam indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 13 Seluma sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan, hambatan, serta rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 13 Seluma berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjalankan Kurikulum Merdeka.

Fokus penelitian adalah evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 13 Seluma dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Informan kunci terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Guru. Selain itu, informan pendukung terdiri dari beberapa peserta didik yang mengikuti pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara

digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran dan kondisi sekolah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen kurikulum, modul ajar, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 13 Seluma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 13 Seluma dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan siswa.

Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma telah berjalan cukup efektif. Perencanaan pembelajaran telah disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP), kemudian dijabarkan ke dalam Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan modul ajar yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru menyatakan bahwa ketercapaian tujuan pembelajaran diukur melalui asesmen formatif, asesmen sumatif, hasil proyek, supervisi pembelajaran, serta laporan hasil belajar peserta didik.

Dari aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, peserta didik menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Penilaian dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai instrumen yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga keterampilan dan sikap peserta didik. Selain itu, proses penilaian dilakukan secara terbuka dan disertai umpan balik kepada siswa. Bagi siswa yang belum mencapai target pembelajaran diberikan remedial dan pendampingan tambahan.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa perbedaan kemampuan dasar siswa dan keterbatasan kesiapan belajar yang menjadi karakteristik sekolah di daerah pelosok. Namun secara umum, tujuan Kurikulum Merdeka telah dapat dicapai sehingga indikator efektivitas tergolong baik.

Efisiensi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Dari aspek efisiensi, sekolah telah berupaya mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal. Pengaturan jadwal pembelajaran, penyusunan perangkat ajar, serta supervisi pembelajaran dilakukan secara terstruktur untuk memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan sesuai rencana. Guru memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik berupa buku, media cetak, lingkungan sekitar, maupun media digital yang tersedia.

Sekolah juga melakukan monitoring terhadap ATP dan modul ajar yang digunakan oleh guru. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti komputer, infokus, dan jaringan internet dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Namun, jumlah fasilitas tersebut masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi.

Selain itu, pembelajaran berbasis proyek yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan. Oleh karena itu, meskipun efisiensi pelaksanaan kurikulum sudah cukup baik, pemanfaatan sumber daya belum dapat dikatakan optimal karena masih terkendala sarana prasarana dan akses teknologi yang terbatas.

Kecukupan (Adequacy) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka telah cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran di SMP Negeri 13 Seluma. Materi pembelajaran disusun berdasarkan capaian pembelajaran dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan peserta didik. Guru melakukan penyesuaian materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa yang memiliki kemampuan belajar yang beragam.

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan juga dinilai telah mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi dilakukan melalui berbagai metode seperti tes tertulis, proyek, observasi, dan penilaian proses. Dengan berbagai bentuk penilaian tersebut, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan kompetensi siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, materi dan kegiatan pembelajaran yang diberikan telah membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka telah mampu memenuhi kebutuhan dasar proses pembelajaran, meskipun masih diperlukan penguatan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa yang memiliki kemampuan sangat beragam.

Pemerataan (Equity) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Dari aspek pemerataan, sekolah telah berupaya menerapkan prinsip keadilan dalam proses pembelajaran. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk bertanya, menyampaikan pendapat, mengikuti diskusi kelompok, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan mendorong keterlibatan aktif seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan akademik mereka.

Sekolah juga mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Guru menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar serta karakteristik peserta didik. Penerapan diferensiasi dilakukan melalui variasi tugas, penggunaan media yang beragam, dan pengelompokan siswa sesuai kemampuan mereka.

Namun demikian, penerapan pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya konsisten di seluruh kelas. Keterbatasan waktu, perbedaan kompetensi guru, dan kondisi siswa yang beragam masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembelajaran secara optimal. Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan Kurikulum Merdeka telah mengarah pada prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan.

Responsivitas (Responsiveness) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma tergolong baik. Sekolah memiliki mekanisme supervisi, monitoring, dan refleksi pembelajaran yang dilakukan secara berkala. Guru secara aktif mengidentifikasi kesulitan belajar siswa melalui pengamatan di kelas, hasil tugas, serta hasil asesmen yang diperoleh siswa.

Apabila ditemukan permasalahan dalam pembelajaran, guru melakukan berbagai tindak lanjut seperti memberikan remedial, pengayaan, pendampingan belajar, serta penyesuaian strategi pembelajaran. Waka kurikulum bersama kepala sekolah juga melakukan evaluasi melalui rapat dan pembinaan kepada guru guna memperbaiki proses pembelajaran yang masih mengalami kendala.

Siswa mengakui bahwa guru memberikan kesempatan untuk bertanya, menjelaskan kembali materi yang belum dipahami, serta membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka cukup responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Ketepatan (Appropriateness) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Dari aspek ketepatan, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma dinilai cukup sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Guru memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan metode, materi, dan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal dan karakteristik siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan telah mengarah pada prinsip diferensiasi dan fleksibilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Kurikulum Merdeka.

Sekolah juga berupaya menyesuaikan implementasi kurikulum dengan sumber daya yang tersedia. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas teknologi dan sarana pembelajaran, pihak sekolah melakukan berbagai strategi adaptasi melalui penggunaan media sederhana, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dan penyesuaian perangkat ajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sasaran dan strategi pelaksanaan Kurikulum Merdeka telah tepat karena mampu menjawab kebutuhan pembelajaran peserta didik di daerah pelosok. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas internet, sarana digital, dan rendahnya kemampuan dasar sebagian siswa masih memerlukan perhatian lebih lanjut agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma telah berjalan cukup baik pada seluruh indikator evaluasi William N. Dunn. Kebijakan ini mampu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana, akses teknologi, dan keberagaman kemampuan siswa di daerah pelosok.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 13 Seluma dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana, akses teknologi, serta kondisi geografis sekolah yang berada di daerah pelosok.

Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma telah mampu mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan. Guru telah menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan modul ajar yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian dilakukan secara komprehensif melalui asesmen formatif, sumatif, proyek, dan observasi sikap peserta didik.

Menurut Dunn (2018), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, maka semakin efektif kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, serta berkembangnya kompetensi peserta didik menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka telah berjalan efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto (2023) yang menemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka mampu meningkatkan keaktifan siswa dan memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas yang diberikan oleh Kurikulum Merdeka berkontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Efisiensi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Efisiensi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma tergolong cukup baik. Sekolah telah berupaya memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal melalui pengelolaan jadwal pembelajaran, penggunaan perangkat ajar, dan pemanfaatan media pembelajaran yang ada. Namun demikian, keterbatasan fasilitas teknologi dan akses internet masih menjadi kendala dalam mendukung pembelajaran berbasis digital.

Menurut Dunn, efisiensi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Suatu kebijakan dinilai efisien apabila tujuan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang relatif minimal. Dalam penelitian ini, sekolah mampu menjalankan Kurikulum Merdeka meskipun berada dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana.

Temuan ini mendukung penelitian Rahmawati (2023) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah daerah terpencil sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, efisiensi implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh kemampuan manajemen sekolah dalam mengelola sumber daya yang ada.

Kecukupan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Aspek kecukupan menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka telah cukup mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Materi pembelajaran, kegiatan belajar, serta sistem evaluasi yang diterapkan telah memberikan dukungan terhadap pencapaian kompetensi siswa. Guru juga melakukan penyusunan materi berdasarkan tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik.

Menurut Dunn, kecukupan berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu mengatasi permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Dalam konteks pendidikan, kecukupan dapat dilihat dari kemampuan kurikulum dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kurikulum Merdeka

yang memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa merupakan implementasi dari prinsip tersebut.

Penelitian oleh Nugroho (2024) juga menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka lebih mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dibandingkan kurikulum sebelumnya karena memberikan ruang bagi diferensiasi pembelajaran dan penguatan kompetensi siswa.

Pemerataan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Pemerataan dalam implementasi Kurikulum Merdeka terlihat dari adanya kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi, serta memperoleh layanan pendidikan yang setara. Guru berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta didik.

Menurut Dunn, pemerataan merupakan distribusi manfaat kebijakan secara adil kepada seluruh kelompok sasaran. Dalam bidang pendidikan, pemerataan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, tetapi juga kesempatan memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menerapkan prinsip keadilan dalam pembelajaran. Namun demikian, keterbatasan kompetensi guru dalam menerapkan diferensiasi pembelajaran secara menyeluruh masih menjadi tantangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyasa yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola keberagaman peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerataan pembelajaran sesuai semangat Kurikulum Merdeka.

Responsivitas Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah memiliki tingkat responsivitas yang cukup baik dalam menghadapi berbagai permasalahan pembelajaran. Guru secara aktif melakukan identifikasi terhadap kesulitan belajar siswa dan memberikan tindak lanjut berupa remedial, pengayaan, maupun pendampingan belajar.

Menurut Dunn, responsivitas mengacu pada kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan dan harapan kelompok sasaran. Kebijakan yang responsif akan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul selama proses implementasi.

Dalam penelitian ini, adanya supervisi berkala, evaluasi pembelajaran, dan komunikasi antara guru dengan siswa menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka telah responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembelajaran berpusat pada siswa (*student centered learning*) yang menjadi salah satu karakteristik utama Kurikulum Merdeka.

Penelitian Suryadi (2023) juga menemukan bahwa sekolah yang menerapkan mekanisme refleksi dan evaluasi secara berkala cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dibandingkan sekolah yang tidak melakukan evaluasi berkelanjutan.

Ketepatan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Ketepatan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma terlihat dari kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan guru menyesuaikan materi, metode, dan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa yang beragam.

Menurut Dunn, ketepatan merupakan tingkat kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan yang tepat diterapkan di SMP Negeri 13 Seluma karena memberikan ruang bagi sekolah untuk beradaptasi dengan kondisi daerah pelosok. Guru dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi yang ada.

Temuan ini sejalan dengan pendapat John Dewey yang menyatakan bahwa pembelajaran harus dikaitkan dengan pengalaman nyata dan lingkungan peserta didik. Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek mampu mendukung penerapan prinsip tersebut.

Secara keseluruhan, berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma dapat dinilai cukup berhasil. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran, peningkatan partisipasi siswa, serta pengembangan kompetensi peserta didik. Namun demikian, peningkatan kualitas sarana prasarana, penguatan kompetensi guru, dan perluasan akses teknologi masih diperlukan agar implementasi Kurikulum Merdeka di daerah pelosok dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dan pembahasan yang penulis paparkan mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka di daerah pelosok (studi pada SMP Negeri 13 Seluma) berdasarkan teori William N. Dunn dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 13 Seluma tergolong cukup efektif. Perencanaan pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran, ATP, dan modul ajar. Tujuan pembelajaran dirumuskan dan disampaikan dengan jelas kepada siswa. Metode pembelajaran aktif seperti diskusi, proyek, dan presentasi mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sistem penilaian juga telah mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui asesmen formatif dan sumatif, sehingga selaras dengan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi.

Dari aspek efisiensi, pelaksanaan Kurikulum Merdeka tergolong cukup efisien namun belum optimal. Sekolah telah mengelola waktu, perangkat ajar, serta melakukan supervisi dan monitoring secara terstruktur. Pemanfaatan media pembelajaran cetak dan digital juga sudah dilakukan. Namun, keterbatasan sarana prasarana, akses teknologi, dan kebutuhan waktu tambahan untuk pembelajaran berbasis proyek menjadi kendala dalam optimalisasi penggunaan sumber daya.

Implementasi Kurikulum Merdeka dinilai cukup memadai dalam menjawab kebutuhan pembelajaran. Materi, kegiatan pembelajaran, dan sistem evaluasi telah mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Guru melakukan penyesuaian materi sesuai dengan kemampuan siswa, serta menggunakan berbagai teknik evaluasi untuk memberikan gambaran kompetensi yang menyeluruh. Meskipun demikian, diferensiasi pembelajaran masih perlu diperdalam untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan siswa secara lebih maksimal.

Dari sisi pemerataan, pelaksanaan Kurikulum Merdeka telah mengarah pada prinsip keadilan pembelajaran. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi dan presentasi. Sekolah juga mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, penerapannya belum sepenuhnya konsisten di semua kelas karena perbedaan kompetensi guru dan keterbatasan waktu perencanaan.

Responsivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka tergolong baik. Sekolah memiliki mekanisme supervisi, monitoring, dan refleksi pembelajaran. Guru responsif terhadap kesulitan belajar siswa melalui remedial, pengayaan, dan perbaikan strategi pembelajaran. Koordinasi antara guru dan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum juga berjalan melalui rapat evaluasi dan pembinaan.

Secara umum, pelaksanaan Kurikulum Merdeka menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik. Kebijakan diterapkan secara adaptif sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Penyesuaian dilakukan dalam metode pembelajaran, tingkat kesulitan materi, serta penggunaan media sederhana sesuai keterbatasan fasilitas. Sasaran kebijakan yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran berpusat pada siswa sudah tepat, meskipun masih memerlukan pendampingan dan evaluasi berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dan pembahasan yang penulis paparkan mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka di daerah pelosok (studi pada SMP Negeri 13 Seluma) dapat diberikan saran:

1. Sekolah perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan memperkuat pelatihan guru terkait strategi pembelajaran aktif dan asesmen autentik agar capaian pembelajaran dapat diraih secara lebih optimal.
2. Pemerintah daerah dan pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan dukungan sarana dan prasarana, terutama fasilitas teknologi dan akses internet. Selain itu, diperlukan pengelolaan waktu yang lebih fleksibel untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek.
3. Guru perlu memperdalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan siswa dengan kemampuan rendah maupun tinggi dapat terakomodasi secara seimbang. Pengembangan bank soal dan perangkat asesmen yang variatif juga perlu ditingkatkan.
4. Sekolah perlu melakukan pendampingan dan supervisi yang lebih intensif agar praktik pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan secara konsisten di seluruh kelas. Kegiatan berbagi praktik baik antar guru juga dapat menjadi strategi peningkatan pemerataan kualitas pembelajaran.
5. Mekanisme refleksi dan evaluasi pembelajaran perlu dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. Sekolah juga dapat mengembangkan forum umpan balik siswa untuk memperkuat respon terhadap kebutuhan belajar.

Perlu adanya pendampingan berkelanjutan dari pengawas atau dinas pendidikan guna memastikan implementasi Kurikulum Merdeka tetap kontekstual dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan sekolah. Evaluasi rutin dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga ketepatan pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Dasar–Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Assa Riswan. (2022). Jurnal Ilmiah Society. *Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*, 2(1), 1–12.
- Desi Pristiawanti, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, R. S. D. (2022). Jurnal Pendidikan Dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2), 337–347. <https://doi.org/10.33387/bioedu.v6i2.7305>
- Dewi, D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model William Dun. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*. 107-113. <https://jurnal.umbulukumba.ac.id/index.php/jpss/article/download/100/51>
- Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Rina, H., Setiawati, B., & Subadi, W. (2018). Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 1(1), 153–171.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/issue/view/1>
- Sagaf, S. (2009). Evaluasi Dalam Pendidikan dan Pembelajaran. *Jurnal Kependidikan dan Sosia Keamanan*. 1001-1012. <https://share.google/SZoE30PQmtc8gWonh>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Edisi kedua). Bandung: Alfabeta.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>.